

# **Kajian dan Advis Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Garut**

**Budiman<sup>1</sup>, Kadar Nurjaman<sup>2</sup>, Lilis Sulastris<sup>3</sup>, Agus Joharudin<sup>4</sup>**

Manajemen, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,  
agusjoharudin@gmail.com

## ***Abstract***

*This study was based on capital inadequacy of PT LKM in Garut that comes from owner capital injection. As a non-bank financial institution that was formed from the consolidation of five micro financial institutions, PT LKM Garut needs capital injection from the owner (Garut municipal government) to carry on its mission as trustworthy municipal enterprise. This study was aimed to examine and advise PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) on capital inclusion adequacy. This study used quantitative approach by using parametric statistics, and financial report analysis from 2014 to 2018. In this period, the performance of LKM was great. Its asset increased from Rp. 16.40 Billions to Rp. 38.37 Billions; its credit increased from Rp. 12.16 Billions to Rp. 32.60 Billions; its savings increased from Rp. 8.53 Billions to Rp. 11.28 Billions; and its deposits increased from Rp. 11.86 Billions to Rp. 17.60 Billions. Furthermore, LKM also has good key performing indices. Its Capital Adequacy Ratio (CAR), Productive Asset Quality (PAQ), Non-Performing Loan, Cash Ratio, Operating Expense Ratio, (OER), Return on Asset, and Loan to Deposit Ratio (LDR) are all within healthy limits.*

***Keywords: Advice, Municipal Capital Injection, non-bank financial institution performance.***

## Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi oleh masalah ketidakmemadai modal PT LKM Garut yang berasal dari penyertaan modal pemilik. Sebagai lembaga keuangan non bank, yang baru terbentuk dari hasil konsolidasi dari 5 lembaga keuangan mikro sejenis, PT LKM Garut memerlukan suntikan modal yang memadai dari pihak *owner* (pembekas) untuk menjalankan misinya sebagai BUMD yang amanah. Studi ini bertujuan untuk mengkaji sekaligus memberikan advis tentang kelayakan penyertaan modal daerah pada PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kabupaten Garut (BUMD), berikut pengaruhnya terhadap kinerja lembaga, sebagai tindak lanjut dari Perda Kabupaten Garut, tentang Penyertaan Modal Daerah. Kajian ini berbasiskan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan statistik parametrik, serta analisis (rasio) terhadap laporan kinerja lembaga keuangan non bank tersebut, sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dilihat dari beberapa aspek, kinerja keuangan PT LKM Garut selama tahun 2014-2018 berkembang cukup pesat, yang diindikasikan dengan pertumbuhan *Asset* dari Rp. 16,40 milyar menjadi Rp.38,37 milyar, penyaluran Kredit dari Rp. 12,16 milyar menjadi Rp. 32,60 milyar; Tabungan dari Rp. 8,53 milyar (2016) menjadi Rp. 11,28 milyar (2018) dan Deposito dari Rp. 11,86 M menjadi Rp.17,60 milyar (2018). Selain dari itu PT. LKM Garut pun, memperlihatkan kinerja keuangan yang sehat yang diindikasikan lewat sejumlah indikator utama kinerja keuangannya, meliputi : *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), *Non Performing Loan (NPL)*, *Cash Ratio*, perbandingan Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO), *Return on Asset (RoA)* dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* yang masih sesuai dengan ketentuan.

**Kata Kunci : Advis, Penyertaan Modal Daerah, Kinerja Lembaga Keuangan Non Bank .**

### 1 Pendahuluan

Peran pemerintah dalam perekonomian, termasuk di dalamnya pemerintah daerah sangatlah strategis, baik dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, regulator maupun koordinator, bahkan sebagai pelaku ekonomi sekalipun. Peran tersebut tidak lagi banyak diperdebatkan, baik dalam teori-teori maupun khasanah pemikiran ekonomi. Melalui berbagai kebijakan yang terkait dengan sektor publik, pemerintah memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal (government investment), berupaya menarik para investor, mendorong perkembangan teknologi, atau menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bursa tenaga kerja (Hamid and Anto, 1997)

Di beberapa negara, baik di negara sosialis maupun kapitalis, peran pemerintah dalam bidang investasi dan pembentukan modal (capital) dinilai sangat menonjol. Bahkan di Jepang dan Taiwan lebih dari separuh pembentukan Gross Domestic Capital-nya dilakukan oleh pemerintah. Yang menarik, bahwa salah satu bentuk penjawantahan peran pemerintah di negara-negara tersebut “dipercayakan” pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diperankan sebagai salah satu mesin penggerak ekonomi, seperti halnya di Singapura dan Malaysia (Akadun, 2007).

Dalam menjalankan perannya, pemerintah di setiap negara tentunya memiliki strategi yang berbeda-beda. Di negeri kita tercinta Indonesia, strategi menggerakkan perekonomian melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara konstitusional dituangkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia, pasal 33. Khusus untuk

BUMD, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 57 Tahun 2017, tentang Badan Usaha Milik Daerah.

PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kabupaten Garut adalah BUMD “termuda” dan berstatus sebagai Lembaga Keuangan Non Bank yang merupakan hasil *merger* dari 3 (tiga) lembaga keuangan (baca : PD. Perkreditan Kecamatan yaitu PD. PK Selaawi, PD PK Cisompet dan PD PK Cikelet), pada tahun 2014 yang lalu. PT LKM dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2015 dan merupakan Badan Usaha Milik Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Garut dengan komposisi kepemilikan saham 91 % Pemerintah Kab Garut dan 9% Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagai perusahaan yang masih berada dalam tahap introduksi, tentunya dihadapkan dengan berbagai persoalan tidak ringan, baik secara internal maupun eksternal, termasuk menyangkut kecukupan modal (*capital*) sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Pemprov. Jawa Barat, dan Pemkab Garut selaku *majority share holder*. Untuk itu, diperlukan kajian khusus terhadap berbagai aspek yang terkait dengan rencana penyertaan modal tersebut, khususnya untuk Tahun Anggaran mendatang (di muka), dengan harapan penyertaan modal dimaksud, dapat berjalan efektif serta berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, bahkan lebih jauh mampu menghasilkan *multiplier effect* bagi pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran sekaligus masukan kepada para *stake holder BUMD* tentang kelayakan usaha PT LKM untuk mendapatkan penyertaan modal dari pemilik (Pemkab Garut) dan prospek serta implikasinya terhadap kinerja perusahaan, berikut perkiraan kembalian investasi (*return*) dan *benefit* yang akan didapat oleh *owner* dan *stake holder* lainnya, apabila penyertaan modal tersebut direalisasikan sesuai rencana. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan *investment advise* atau rekomendasi dalam menggunakan/membelanjakan modal yang berasal dari penyertaan pemilik secara efektif dan produktif.. terkait dengan penyertaan modal Pemkab sebagai bahan masukan bagi Pemkab Garut dalam menetapkan rencana penyertaan modal, sesuai dengan kelayakan usaha BUMD tersebut.

## 2 Tinjauan Literature

### 2.1 Investasi

Menurut Sukirno (2001) kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni :

- a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
- b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
- c. Investasi umumnya diikuti pula dengan perkembangan teknologi untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri.

### 2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah atau PAD yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dengan demikian Pendapatan

Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Sumber sumber PAD dapat meliputi antara lain :

### **2.1.1 Hasil Pajak Daerah;**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### **2.1.2 Hasil Retribusi Daerah;**

Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### **2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Nurcholish, 2005). Menurut Ahmad Yani (2002) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

### **2.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah**

Menurut Pasal 6 undang undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lain lain PAD yang sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah daerah.

## **2.3 Penyertaan Modal Daerah**

Modal merupakan persoalan utama dalam menggerakkan kegiatan sebuah perusahaan. Keberadaan modal dalam sebuah perusahaan adalah menyangkut dengan keseluruhan harta perusahaan yang diputar untuk menjalankan usaha. Kekurangan modal usaha akan mengakibatkan peluang untuk menjalankan kegiatan bisnis akan terhambat dan ini berpengaruh kepada tingkat keuntungan yang diperoleh. Menurut Riyanto (2001) yang mengutip pendapat Meij mengartikan modal sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam Neraca sebelah debet, sedang yang dimaksudkan dengan barang-barang modal ialah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. Dari pengertian diatas, maka modal adalah keseluruhan harta perusahaan yang terdapat Pada sebelah passiva neraca, baik yang termasuk dalam neraca lancar, maupun harta tetap. Selanjutnya Riyanto (2001) juga mengutip pendapat Polak yang mengartikan modal sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal adalah *terdapat* di neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah barang-barang yang terdapat dalam perusahaan yang belum digunakan, jadi yang terdapat dalam neraca sebelah debet. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan modal adalah keseluruhan harta perusahaan yang ditanam dalam kegiatan usaha, baik harta tetap, harta lancar maupun harta tak terwujud. Dan semua unsur modal terdapat dalam perkiraan neraca.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah, Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan:

- a. Sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pertumbuhan ekonomi;
- c. Pendapatan masyarakat; dan
- d. Penyerapan tenaga kerja

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas. Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi perencanaan penyertaan modal oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan perencanaan kebutuhan penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari APBD. Perencanaan penyertaan modal oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan penyertaan modal pemerintah daerah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Penyertaan Modal pemerintah daerah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan penyertaan modal.

### **3 METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh pendekatan kualitatif. Metode kuantitatif yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan sesuatu secara utuh dalam bentuk tulisan yang dianalisis atau diuraikan secara sistematis. Penelitian ini mengambil data dari Laporan Kinerja Keuangan PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Garut Dari rentang waktu tahun 2014 sampai dengan 2018 dan data laporan keuangan pemerintah Kabupaten Garut rentang periode tahun 2012 sampai dengan 2018, data kemudian dihimpun dan dianalisis untuk memperoleh penjelasan mengenai hubungan antara beberapa variabel penelitian. Studi ini bertujuan menganalisis kontribusi penyertaan modal daerah terhadap kinerja BUMD.

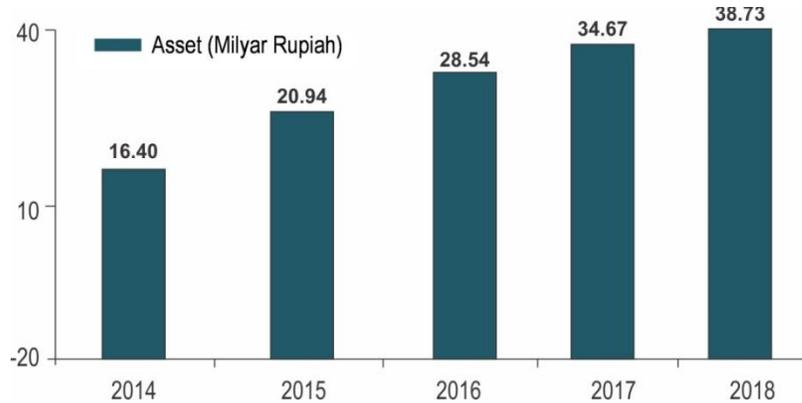
Penelitian ini menggunakan dua analisis untuk dalam menilai kelayakan penyertaan modal pada PT. LKM. Yang pertama adalah analisis perkembangan usaha dari PT. LKM. Hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan trend dan perkembangan perusahaan ini. Kemudian yang kedua adalah analisis kinerja keuangannya. Beberapa hal yang dijadikan indikator dalam kinerja keuangan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Asset (ROA), Loan to Deposits Ratio (LDR), Operating Expense Ratio (OER), Cash Ratio, Non Performing Loan (NPL), dan rasio aktiva produktif (Mulyawan, 2015; Setia Mulyawan, 2015).

## **4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.4 Perkembangan Usaha PT. LKM Garut**

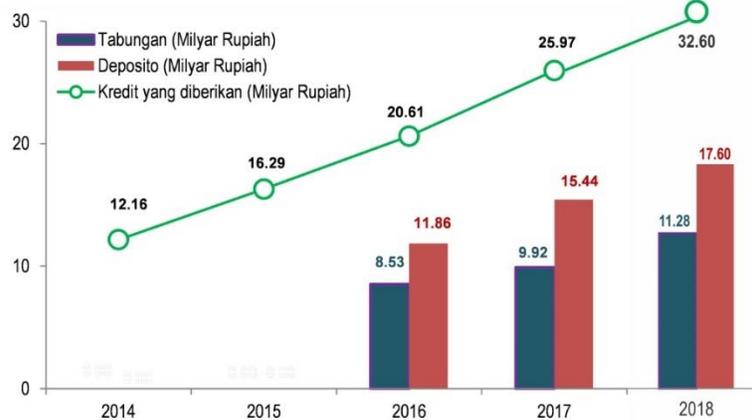
Perkembangan Nilai Asset PT LKM Garut dari tahun 2014 sampai tahun 2018 trend-nya terus meningkat. Pada awal *merger* (tahun 2014) memiliki aset sebesar Rp. 16,40 miliar dan pada tahun 2018 berjumlah Rp 38,37 milyar. Kredit yang disalurkan sebesar Rp 32,60 milyar atau bertumbuh sebesar 133,96%. Perkembangan tersebut berdampak positif terhadap pendapatan bunga, sebagaimana terlihat dari jumlah pendapatan yang akan diterima sampai dengan tahun 2018 yaitu Rp. 0,456 milyar. Selain

itu, kas PT LKM mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,6 milyar sehingga likuiditas PT LKM cukup memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, penyertaan modal daerah mampu meningkatkan pendapatan bunga dan penyaluran kredit pada sektor UMK dan berdampak positif terhadap kinerja lembaga.



**Gambar 1. Perkembangan nilai aset PT LKM Garut Tahun 2014-2018**

Gambar 1. di atas memperlihatkan, bahwa perkembangan aset meningkat secara signifikan. Dari semula sejumlah Rp. 16,40 milyar pada tahun 2014 menjadi Rp. 20,94 milyar pada tahun 2015, artinya naik 27,68%. Pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 28,54 milyar atau naik 40,66 persen; dan tahun 2017 bertambah menjadi Rp. 34,67 milyar, atau meningkat sebesar 21,48 persen. Tahun 2018 mencapai sebesar Rp. 38,37 milyar atau naik 10,76%. Secara keseluruhan aset PT LKM meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar Rp. 5,65 milyar, atau 25,75%. Peningkatan aset tersebut memberi peluang dalam mendorong peningkatan penyaluran kredit, baik kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit multiguna, sehingga bermuara pada meningkatnya Laba PT LKM secara kumulatif.



**Gambar 2. Perkembangan kredit, tabungan dan deposito PT LKM Garut Tahun 2014-2018**

Tabungan pada PT LKM dari tahun 2016 sampai tahun 2018, terus meningkat, dari Rp. 8,53 miliar (2016), menjadi Rp.9,92 miliar (tahun 2017) dan naik menjadi Rp.11,28 miliar pada tahun 2018. Pertumbuhan deposito pada kurun waktu yang sama meningkat cukup pesat, yaitu sebesar 30% (dari Rp 11,86 menjadi Rp 15.440 milyar). Pesatnya pertumbuhan dana deposito mendorong PT LKM untuk menaikkan bunga deposito sebesar 8,25%. Kondisi ini memungkinkan PT LKM mampu meningkatkan volume kreditnya dari tahun ke tahun. Yaitu dari Rp. 12,16 milyar (tahun 2014) naik menjadi Rp. 16.29 milyar (tahun 2015), artinya meningkat Rp.4,13 milyar (33,96%) dan pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi Rp. 20,61 milyar atau naik Rp.4,32 milyar (26,52%). Pada tahun 2017, volume kredit naik menjadi sebesar Rp. 25,97 milyar atau naik menjadi 5,36 milyar rupiah (26 %), sehingga per tahun `rata-rata naik sebesar Rp. 4.6 milyar (28,82 persen).



**Gambar 3. Perkembangan Laba setelah pajak PT. LKM Garut Tahun 2014-2018**

Laba Setelah Pajak selama 4 tahun secara berturut turut meningkat, yaitu Rp. 203,37 juta (tahun 2014); menjadi sebesar Rp.312,40 juta pada tahun 2015, naik menjadi Rp.332,11 juta (tahun 2016), meningkat kembali menjadi Rp.449,78 juta pada tahun 2017, dan tahun 2018 mencapai Rp.479,37 juta. Artinya kenaikan Laba PT LKM Garut, rata-rata per tahun mencapai sebesar Rp. 55,2 juta atau sebesar 25,48 persen.

### 2.5 Kinerja Keuangan PT. LKM Garut

Pada dasarnya kinerja keuangan PT LKM Garut menunjukkan kinerja yang sehat, hal ini bisa dilihat berdasarkan beberapa indikator kinerja keuangan yang meliputi CAR, KAP, NPL, ROA, BOPO, CASH RATIO DAN LDR. Secara rinci capaian inidikator kinerja PT LKM tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1. Tingkat Kinerja Keuangan PT. LKM Garut Tahun 2016-2018 (%)**

<b>Indikator</b>	<b>Kriteria Sehat</b>	<b>Rasio Tahun 2016</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Proyeksi 2017</b>	<b>Ktgn</b>	<b>Proyeksi 2018</b>	<b>Ktgn</b>
<b>CAR</b>	$\geq 8$	29,16	Sehat	19,4	Sehat	23.58	Sehat
<b>KAP</b>	$\leq 10,35$	2,11	Sehat	2,65	Sehat	1.60	Sehat
<b>NPL GROS</b>	$\leq 10$	3,03	Sehat	2,60	Sehat	1.74	Sehat
<b>NPL NET</b>	$\leq 10$	0,64	Sehat	2,60	Sehat		
<b>ROA</b>	$\geq 1,215$	1,20	Sehat	1,46	Sehat	1.55	Sehat
<b>BOPO</b>	$\leq 93,52$	94,42	Kurangsehat	93,42	Sehat	91.76	Sehat
<b>CASH RATIO</b>	$\geq 4,05$	24,37	Sehat	8,00	Sehat	10.40	Sehat
<b>LDR</b>	$\leq 94,75$	72,94	Sehat	84,66	Sehat	85.63	Sehat

Sumber : Laporan Tahunan PT LKM Garut Tahun 2018

Capital Adequacy Ratio (CAR) PT LKM Garut tahun 2017 adalah sebesar 19,4%, artinya ada penurunan sebesar 9,76 dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 29,16%. Tahun 2018, meningkat menjadi 23,58%. Walaupun CAR tahun 2016-2018 masih berada pada batas aman yaitu  $\geq 8$ , namun demikian bagi pihak manajemen PT LKM Garut, penurunan CAR tersebut patut menjadi catatan, karena semakin rendah CAR maka akan semakin turun kemampuan untuk menanggung risiko kredit/aktiva produktif. Jika rasio CAR semakin menurun, mengandung arti pula, bahwa kemampuan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional dan probabilitas capaian profitabilitas akan menurun. Bila dinilai secara normatif, rasio kecukupan moda/CAR PT LKM Garut masih tergolong baik.

Kualitas Aktiva Produktif (KAP), pada tahun 2016 tercatat sebesar 2,11% atau berpredikat sehat, karena batas maksimal dinyatakan sehat sebesar 10,35%. Periode 2017 sebesar 2,65% atau mengalami kenaikan sebesar 0,54%, dan tahun 2018 sebesar 1,60% Hal ini sesungguhnya mengindikasikan rasio yang kurang baik, walaupun masih berada dalam batas normal karena adanya penurunan jumlah Aktiva Produktif yang disalurkan dan kenaikan jumlah Aktiva Produktif yang berisiko.

Rasio non performing loan (NPL) PT LKM Garut pada tahun 2017 sebesar 2,60, artinya mengalami kenaikan sebesar 0,43% dibandingkan tahun 2016, dan tahun 2018 mencapai angka 1,74%. Apabila dilihat perkembangannya sepanjang tahun 2016-2018, secara normatif, rasio tersebut masih termasuk dalam kategori sehat, karena masih di bawah 5%.

Dari data diketahui, nilai ROA periode 2017 adalah 1,46% yang diperoleh dari laba sebelum pajak. Nilai ROA periode 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,26% dan tahun 2018 mencapai angka 1,55%, hal ini dimungkinkan karena terdapat kenaikan total aktiva yang diikuti dengan kenaikan laba. Jadi, ROA periode 2016-2018 berpredikat sehat/baik, karena naik di atas 1,22%.

Rasio BOPO tahun 2016 sebesar 94,42%. Artinya berpredikat kurang sehat karena nilainya lebih dari 93,52%. Rasio BOPO periode 2017 diketahui sebesar 93,42%. Terjadi penurunan sebesar 1% pada periode 2017. Tahun 2018 turun menjadi 91,76%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan beban operasional yang dikeluarkan daripada periode sebelumnya akan tetapi sudah diimbangi dengan adanya kenaikan pula pada sisi pendapatan operasional. Jadi, BOPO periode 2016-2018 berpredikat sehat karena di bawah angka maksimal (93,52%).

Dari tabel diatas diketahui nilai CR periode 2016 sebesar 24,37%. Standar CR berpredikat sehat adalah minimal 4,05%. Jadi, CR periode 2016 berpredikat sehat karena nilainya lebih dari 4,05%. Nilai CR periode 2017 diketahui sebesar 8%. Atau mengalami penurunan sebesar 16,37%. Tahun 2018 naik menjadi 10,40%, dimungkinkan karena jumlah utang lancar bertambah dan ketersediaan dana likuid bertambah. Secara umum, LDR PT LKM tahun 2016-2018 termasuk sehat karena kurang dari 93,75%.

## 5 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyertaan modal daerah terhadap kinerja PT. LKM Garut dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil penelitian di dapat kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kinerja keuangan PT LKM Garut sepanjang Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, tergolong sehat sebagaimana tercermin dari sejumlah indikator utama kinerja keuangan lembaga tersebut, yang meliputi: *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), *Non Performing Loan (NPL)*, *Cash Ratio*, perbandingan Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO), *Return on Asset (RoA)* dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.
- b. Penambahan Penyertaan Modal Daerah/Pemkab pada PT LKM Garut, berimplikasi pada kenaikan asset, volume kredit dan Laba setelah pajak (*Earning after Tax*) PT LKM.
- c. Peningkatan Laba Setelah Pajak/*Earning After Tax (EAT)* PT LKM Garut, sebagai dampak dari adanya Penyertaan Modal Daerah, tidak secara *absolute* diikuti dengan meningkatnya jumlah nominal bagian Laba yang Disetorkan kepada Pemkab (*owner*).

## Referensi

Akadun (2007) *Administrasi perusahaan negara*. Bandung: Alfabeta.

Hamid, E. S. and Anto, M. B. H. (1997) 'Telaah Pembangunan Ekonomi Indonesia', *Economic Journal of Emerging Markets*, 2(1), pp. 16–28.

Mulyawan, S. (2015) 'The Benefits of Financial Ratios' as the Indocators of Future Bankruptcy on the Economic Crisis', *International Journal of Nusantara Islam*, 3(1), pp. 21–30.

Nurcholish, H. (2005) *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Riyanto, B. (2001) *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4*, Yogyakarta: Bpfe. Djogjakarta: BPFPE.

Setia Mulyawan, S. (2015) 'Manajemen Keuangan'. Pustaka Setia.

Sukirno, S. (2001) *Pengantar Teori Makro, Raja Grafindo, Jakarta*. Jakarta: Raja Grafindo.

Yani, A. (2002) *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.

## Biografi Penulis

	<b>Budiman.</b> Dosen tetap pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Menyelesaikan pendidikan Doktor pada tahun 2017 dari Proram Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara Bandung, dan saat ini mengajar mata kuliah Manajemen Stratejik, Lembaga Keuangan, Pasar Uang dan Pasar Modal.
	<b>Kadar Nurjaman.</b> Dosen tetap pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Menyelesaikan pendidikan Doktor pada tahun 2018 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, saat ini mengajar mata kuliah Manajemen, Pemasaran, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia.
	<b>Lilis Sulastri Lagut.</b> Dosen tetap pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Menyelesaikan pendidikan Doktor pada tahun 2013 dari Program Doktor Ilmu Manajemen Univeritas Pasundan, dengan konsentrasi Manajemen Sumber daya Manusia. Saat ini mengajar mata kuliah Manajemen Sumberdaya Manusia sesuai bidang ampu dan keahlian, serta matakuliah lain seperti etika bisnis, komunikasi bisnis, studi kelayakan bisnis, dll.
	<b>Agus Joharudin.</b> Dosen tetap Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Setelah menamatkan pendidikan Magisternya di University of Auckland, kemudian Agus memutuskan untuk mengabdikan di almamater S1nya. Saat mengajar mata kuliah Manajemen Operasi, Komunikasi Bisnis, dan Teori & Perilaku Organisasi.